

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

Ni Made Heryani Dian Indraswari^{1*}, I Wayan Sudemen², Nyoman Sumawidayani³

^{1,2,3}Universitas Warmadewa

*Corresponding author: dianindraswari23@gmail.com

Abstract

The Planning Agency of Bangli Regency plays a role in formulating development plans to realize the New Era of Bangli. However, this institution faces obstacles in the form of limited human resources and insufficient regional funds, which hinder the planning process. Therefore, this study aims to review and analyze human resource performance and budgeting as important factors in supporting the achievement of the New Era of Bangli. This study uses a type of qualitative research using data analysis techniques, namely Data Collection, Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/Verifying which connects events and describes phenomena in the field that are the topic of research through observation, interviews, and documentation and uses organizational performance theory from Kumorotomo with 4 indicators, namely Efficiency, Effectiveness, Fairness, and Responsiveness. The results of the study show that Human Resources (HR) in the Regional Development Planning Agency cannot be fully said to be in accordance with the Efficiency and Effectiveness indicators because of the inhibition in the development planning process due to the delay in SIPD verification and lack of training in planning. Meanwhile, budgeting has been said to be running quite well because of the allocation of funds used according to needs in the formulation of programs and activities.

Keywords: Performance; BAPPEDA Human Resource; Budgeting; Development Planning; New Era Bangli

Pendahuluan

Melaksanakan pembangunan memerlukan suatu proses perencanaan serta pelaksanaan untuk meningkatkan kapasitas pada pemerintahan daerah secara efektif. Pembangunan daerah harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap serta mengutamakan prioritas dan pemerataan pembangunan, salah satu pemerintah daerah yang memiliki peran dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) (Indah Sri Wahyuli Lubis & Sihombing Tunggal, 2022). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Kabupaten Bangli merupakan salah satu instansi pemerintah yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli di bawah naungan Bupati Bangli. Bupati Bangli yang memiliki fungsi dan tugas dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangli dalam gagasan mewujudkan visi dan misi untuk Bangli Era Baru dengan menuju arah pembangunan yang lebih baik dan merata. Kabupaten Bangli sudah menunjukkan banyak perubahan yang signifikan, hal ini dilakukan oleh Bupati Bangli guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Melalui visi yang dibuat yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli melalui Pola Pengembangan Semesta Berencana Kita Wujudkan Bangli Era Baru” dengan 9 misi didalamnya terdapat berbagai macam yang menunjang kesejahteraan masyarakat untuk Kabupaten Bangli. Pembangunan yang akan dirancang pada visi misi Bupati terpilih, diterjemahkan dan diakomodasi ke dalam RPJMD-SB 2021-2026.

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja BAPPEDA Kab. Bangli

No.	Indikator Capaian	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
Perencanaan Pembangunan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.	99	99	99	99	99	99
4	Adanya penyusunan dokumen RKPD yang ditetapkan.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD.	97	97	97	97	97	97
6	Persentase implementasi rencana penelitian dan pengembangan.	80	85	90	95	100	100
7	Persentase pemanfaatan hasil litbang.	80	85	90	95	100	100
8	Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	45	50	55	60	65	65
9	Penerapan kebijakan yang di terapkan di daerah.	80	85	90	95	100	100

Sumber : BAPPEDA Kab. Bangli 2024

Tabel 1 merupakan target capaian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai pedoman dalam mewujudkan Bangli Era Baru. Capaian kinerja tersebut secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran pada RPJMD-SB 2021-2026. Dalam hal ini perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk menyusun dan merancang serta melaksanakan untuk keselarasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Semesta Berencana Kabupaten Bangli.

Disisi lain banyaknya tuntutan pembangunan untuk menjalankan misi dari prioritas pembangunan maka dari itu peran serta kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan (Saam, 2022) hasil dari perencanaan pada bidang infrastruktur fasilitas pelayanan publik yang saat ini telah dibangun yaitu Gedung-gedung perkantoran seperti Gedung DPRD, Gedung BMB, Gedung Layanan Pengaduan 24 Jam dan Gedung laboratorium Kesehatan daerah dan pada tahun 2023 lalu Gedung MAL Pelayanan Publik sudah selesai dituntaskan. Namun masih banyak juga pembangunan yang sedang dibangun dan akan dibangun di Kabupaten Bangli. Keberhasilan dalam menjalankan misi dari mewujudkan Bangli Era Baru ini yaitu telah banyak mengalami perubahan, banyaknya bangunan fisik yang dikebut untuk kebutuhan masyarakat, dalam berita (Suyata, 2023). Selain anggaran yang menjadi aspek penting, kemampuan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh besar dalam perencanaan yang akan dirancang atau dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta didukung dengan kemampuan ahli kinerja yang dimiliki merupakan hal yang terpenting harus dipersiapkan dan diperhatikan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kinerja dari sdm dan penganggaran dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangli dengan melihat keberhasilan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan permasalahan- permasalahan yang ada untuk mewujudkan Semesta Berencana tersebut yang diyakini akan mampu mengantarkan Bangli menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dicirikan tanpa penggunaan alat statistik, dan menekankan dalam sebuah fenomena dan substansi yang terjadi pada fenomena tersebut. Menurut Creswell (2014) dalam (Ratnaningtyas Marendah Endah et al., 2023). Lokasi penelitian ini terletak di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Terdapat dua sumber data pada penelitian ini, yaitu sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara secara mendalam terhadap pihak yang terlibat dan berperan dalam kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Bangli Era Baru. Sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan dengan perumusan kebijakan serta strategi dalam penyusunan dan referensi lainnya yaitu berupa berita mengenai perubahan yang terjadi pada Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun.. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara.

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan maksud untuk memperoleh informasi langsung dan temuan hasil terkait kinerja dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangli. Jumlah informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari kepala bappeda, kabid, dan kasubag keuangan.

Pembahasan

Hasil Efisiensi

Efisiensi mengenai mekanisme dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup berbagai tahapan dengan melibatkan banyak pihak, proses atau mekanisme sangat diperlukan untuk memastikan agar penyusunan lebih terarah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional untuk mengetahui hal tersebut maka didapatkan hasil bahwa:

“Mekanisme dalam penyusunan perencanaan ada beberapa proses, terutama dalam perekonomian SDA dan infrastruktur itu sendiri dimana segala jenis penyusunan dibuat terlebih dahulu oleh masing masing OPD melalui prinsip utama yaitu partisipatif yaitu keterlibatan stakeholder lalu dimasukkan kedalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) untuk kesesuaian lalu dapat diverifikasi jika memang layak agar menjadi sebuah dokumen yang ditindaklanjuti. Maka dalam penyusunan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.”

Wawancara Kabid Perekonomian, SDA dan infrastruktur (11 Desember 2024).

Keterlambatan verifikasi pada sistem SIPD dikarenakan adanya faktor- faktor yaitu faktor penghambat salah satunya kesesuaian data dokumen rencana kerja sangat dibutuhkan untuk membantu dalam kelancaran proses penyusunan perencanaan pembangunan namun jika dokumen belum sesuai maka akan dilakukan pengecekan ulang oleh sistem SIPD didapatkan hasil bahwa:

“Hambatan penyusunan perencanaan pembangunan sangat banyak terutama untuk bangli era baru ini dan keberlangsungan bangli kedepannya. Pertama itu adalah ketidaksesuaian data yang diberikan oleh OPD membuat kinerja dari SDM terhambat karena harus menyesuaikan ulang sehingga solusi dari kami adalah menunda dari proses penyusunan perencanaan RKPD ditambah minimnya SDM yang ada di BAPPEDA.” **Wawancara dengan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (13 Januari 2025).**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli mempunyai tujuan yaitu menyusun perencanaan tahunan (RKPD) yang memang rutin dirancang untuk diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berjalan sesuai dengan target capaian yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai bentuk kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangli. Adapun hasil penelitian mengenai Kajian Kinerja Sumber Daya Manusia dan Penganggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Untuk Mewujudkan Bangli Era Baru dengan menggunakan indikator teori kinerja menurut Kumorotomo dalam (Erlianti & Fajrin, 2021) yang diantaranya, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan

daya tanggap.

Sumber Daya Manusia (SDM) BAPPEDA belum dikatakan efisien dan dari segi anggaran sudah dapat dikatakan efisien, karena dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang masih belum optimal dengan kendala yaitu krisisnya anggaran dalam mewujudkan Bangli Era Baru sehingga mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan RKPD menjadi sedikit terhambat karena harus menunggu verifikasi data dan rencana kerja yang dibuat oleh OPD. Dana alokasi yang didapatkan tersebut merupakan dana dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Keuangan Khusus (BKK) yang diupayakan BAPPEDA dan Tim Anggaran dalam menentukan ketepatan antara input (anggaran) dengan output program yang harus berkesinambungan agar pada proses penyusunan perencanaan pembangunan tidak memakan waktu yang cukup lama. Untuk mewujudkan Bangli Era Baru tugas BAPPEDA itu sendiri dalam penyusunan perencanaan masih harus melihat apa yang menjadi hambatan baik dari sumberdaya, solvabilitas ataupun kesesuaian data yang diberikan oleh OPD terhadap BAPPEDA agar selalu tepat pada tujuan dan sasaran sehingga mekanisme dari penyusunan berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Program/Detail	Total Belanja	Sub Kegiatan	Kegiatan	Saluran	Pagu Indikat	Belanja Page	Kegiatan Belanja	Realisasi Persentase
1.01.2.19.0.00.00.0000 Dana Pendidikan, Prestasi dan Olahraga	76	0	0	339,863,000,369.00	339,863,000,369.00	339,863,000,369.00	339,863,000,369.00	0.00 %
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dana Kesehatan	90	0	0	89,000,788,216.00	108,271,033,216.00	111,000,417,416.00	108,271,033,216.00	0.00 %
1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Bangli	18	0	0	2,122,251,600.00	2,201,088,810.00	2,201,088,810.00	2,201,088,810.00	0.00 %
1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Bangli Utara	17	0	0	1,986,852,450.00	2,201,088,810.00	2,201,088,810.00	2,201,088,810.00	0.00 %
1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Bangli Selatan	30	0	0	2,365,170,140.00	2,454,256,300.00	2,454,256,300.00	2,454,256,300.00	0.00 %
1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bangli Timur	16	0	0	2,143,196,792.00	2,454,256,300.00	2,454,256,300.00	2,454,256,300.00	0.00 %
1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bangli Barat	26	0	0	2,217,088,600.00	2,322,132,940.00	2,322,132,940.00	2,322,132,940.00	0.00 %
1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Bangli Tengah	28	0	0	2,306,403,800.00	2,314,344,710.00	2,314,344,710.00	2,314,344,710.00	0.00 %
1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bangli Selatan	29	0	0	2,364,587,600.00	2,384,000,000.00	2,384,000,000.00	2,384,000,000.00	0.00 %
1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bangli Utara	26	0	0	1,806,340,000.00	2,154,987,960.00	2,154,987,960.00	2,154,987,960.00	0.00 %

Gambar 1. Verifikasi Rencana Kerja yang di Susun oleh OPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli
Sumber: BAPPEDA KAB. BANGLI, 2024

Rencana kerja yang di verifikasi oleh BAPPEDA pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) per tahun 2024 ini berjumlah 21 dokumen yang sebagian besar terdiri dari bidang Kesehatan, RKPD tersebut disusun lalu di input sehingga nantinya dapat dilanjutkan berupa kegiatan-kegiatan atau perumusan program. Dalam prioritas utama penyusunan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur pelayanan publik tersebut masuk dalam SIPD RPJM yang sistemnya juga sama seperti pada RKPD yaitu disusun terlebih dahulu oleh OPD lalu di pertimbangkan oleh BAPPEDA untuk dapat dikatakan layak atau tidaknya program tersebut. SIPD ini dimiliki oleh seluruh daerah untuk memudahkan dalam mengklaim perencanaan pembangunan di masing-masing daerah.

Efektifitas

Analisis mengenai ketercapaian program dan kegiatan pada dokumen LKjlp Tahun 2021- 2023 telah menunjukkan hasil 100% yang dimana artinya program dan kegiatan sudah dapat dijalankan. Namun mengenai kinerja SDM dalam mencapai visi dan misi organisasi masih dikatakan belum sesuai didapatkan hasil bahwa:

“Hasil kerja dari SDM tidak sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi organisasi dan memenuhi apa yang menjadi tujuan dan visi misi organisasi, karena kurangnya pelatihan khusus dalam perencanaan umum, hal tersebut selalu akan menjadi kekurangan yang harus kami rubah setiap tahunnya, namun SDM BAPPEDA akan mengusahakan agar target capaian kinerja SDM selalu diangka 99% dan wajib kami harus sesuai dengan target kinerja. **Wawancara dengan Kasubag Keuangan (12 Desember 2024).**



Dalam pemanfaatan anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan hal yang diupayakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing program dan kegiatan walaupun masih terdapat bantuan dana transfer dari daerah lain BAPPEDA mampu mengalokasikan dengan baik didapatkan hasil bahwa:

“Penggunaan alokasi anggaran telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan namun kembali lagi dana yang kami dapatkan tidak dapat menjamin membiayai seluruh program dan kegiatan yang sedang berjalan lalu upaya yang kami lakukan itu dengan menggunakan alokasi dana dari BKK di kabupaten lain seperti kabupaten badung untuk membantu menunjang prioritas pembangunan di Kabupaten Bangli ini” **Wawancara dengan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (11 Desember 2024).**

Efektifitas dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugas secara internal dikatakan belum sepenuhnya efektif karena pada proses pelaksanaan tugasnya sebagai penyusun perencanaan masih perlu diadakan pelatihan dan pemahaman agar dapat menciptakan kinerja sesuai dengan visi dari organisasi yaitu terwujudnya perencanaan daerah yang inovatif, aspiratif dan aplikatif. Disampaikan bahwa tidak semua SDM dapat bekerja sesuai dengan visi dan misi keterbatasan SDM dengan tugas yang diemban mengharuskan seluruh SDM berkerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan SOP Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Kepala BAPPEDA yang kini menjadi acuan kinerja oleh SDM di BAPPEDA dengan adanya PK (Perjanjan Kerja) akan membuat kinerja SDM BAPPEDA lebih terarah dan berlandaskan aturan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Kosistensi RPJMD dengan RKPd	%	90
2	Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan	%	100

Gambar 2. Dokumen Perjanjian Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangli
Sumber: BAPPEDA KAB. BANGLI, 2024

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN</p>	<p> Nomor SOP : 001 / 019 / 2013 Tgl. Pembuatan : 8 Januari 2013 Tgl. Revisi : Tgl. Entri : Disahkan oleh : </p> <p style="text-align: center;">  H. Nuzul Falaq Mubandahati J. 021-93511111-10200031001 </p>
<p>SASARAN HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (kemudian disingkat dengan Undang-Undang No. 25, 2004, dan selanjutnya dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 44/21) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Audit Ketaatan Pelaksanaan Anggaran Keuangan dan Manajemen Keuangan Daerah 5. Peraturan Bupati Bangli Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kabupaten, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 	<p>KOMPONEN PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meninjau Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah dan Kabupaten 2. Memantau Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli 3. Memantau Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang yang berkaitan dengan Model Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Memantau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
<p>KETERANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Baru Kebut 2. SOP Pengubahan Reng 	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK
<p>PERINGATAN</p> <p>Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tepat waktu sehingga dapat berakibat keterlambatan membuat perencanaan Reng RKPD</p>	<p>PENCATATAN DAN PENGANTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Bupati tentang Tim Penyusun RKPD 2. Rancangan Awal RKPD 3. Rancangan Akhir RKPD 4. Peraturan Bupati tentang RKPD

Gambar 3. SOP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli
Sumber: BAPPEDA KAB. BANGLI, 2024

Dalam dokumen perjanjian kinerja tersebut dinyatakan bahwa target dan sasaran kinerja BAPPEDA harus berlandaskan perjanjian kerja yang dibuat maka kinerja yang dilakukan oleh SDM BAPPEDA harus maksimal dan memenuhi target. Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) kinerja bahwa dalam setiap pekerjaan harus mengadakan evaluasi namun hal tersebut belum terlaksana maksimal di BAPPEDA.

Keadilan

Keadilan mengenai tugas pokok dan fungsi dari sumber daya manusia dengan keterlibatan kerja pada penyusunan perencanaan pembangunan dikatakan apakah semua sudah terlibat atau masih ada yang memang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat dikatakan adil atau tidak dihasilkan bahwa:

“Yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangli secara global adalah seluruh pemangku kepentingan untuk membantu mempertimbangkan sampai mengesahkan. Karena pendapatpendapat dari pemangku kepentingan atau stakeholder sangat dibutuhkan agar penyusunan sesuai dengan apa yang diinginkan

Bersama sehingga mewujudkan bangli era baru ini akan membawa kabupaten bangli kedalam kehidupan tatanan yang lebih baik.” **Wawancara dengan Kepala BAPPEDA (11 Desember 2024).**

Keterlibatan secara global memang seluruh pemangku kepentingan, namun dalam masing- masing bidang tentu memiliki tugas yang berbeda-beda untuk melihat keterlibatan tersebut disampaikan oleh bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi bahwa:

“Pada bidang ini seluruhnya terlibat dan diharuskan bekerja sama untuk melaksanakan penyusunan perencanaan termasuk staff dan tenaga kontrak, hal itu dikarenakan karena minimnya SDM yang ada di BAPPEDA membuat tingkat kerjasama antar tim di bidan kami harus selalu ditingkatkan apalagi dalam bidang perencanaan dan itu sifatnya kompleks dan menyeluruh jadi kami menampung semua dengan keterbatasan yang kami punya.” **Wawancara dengan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (11 Desember 2024).**

Keadilan berkaitan dengan distribusi dan alokasi layanan yang di selenggarakan oleh organisasi terhadap masyarakat. Keadilan mempersoalkan mengenai tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan serta nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Keadilan juga mencakup pada prinsip- prinsip yang adil, transparan, tanpa memandang faktor social, agama dan sebagainya. Keadilan digunakan untuk mengukur kinerja yang mencakup keterlibatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SDM di BAPPEDA dalam penyusunan perencanaan pembangunan, keterlibatan tersebut dilihat dari partisipasi SDM dalam keikutsertaan menyusun perencanaan pembangunan pada masing- masing bidang dengan memanfaatkan minimnya SDM yang terdapat di BAPPEDA Kabupaten Bangli. Dalam lingkup kabupaten keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini sudah terlaksana dengan baik dalam membantu mempertimbangkan sampai mengesahkan karena dalam mewujudkan Bangli Era Baru sangat diperlukan pendapat-pendapat untuk keberlangsungan sebuah pembangunan. Selain keterlibatan SDM dan pemangku kepentingan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga tidak kalah penting, transparansi dalam penganggaran selalu ada dan dijabarkan dengan indikator yang jelas sehingga dalam evaluasi umum akhir mengenai target pembangunan tidak ada lagi yang dipertanyakan, transparansi anggaran penting dilaksanakan agar para pemangku kepentingan dapat memperhitungkan kembali terkait hasil-hasil dana yang memang harus di prioritaskan, sehingga dalam pembagian anggaran diupayakan agar selalu merata untuk prioritas pembangunan dan misi pembangunan lainnya.

Daya Tanggap Menanggapi keluhan oleh OPD terhadap BAPPEDA selalu mengharapkan agar tidak ada keluhan yang datang, karena BAPPEDA selama ini sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perjanjian kerja (PK) yang disepakati oleh banyak pihak didapatkan hasil wawancara bahwa:

“Untuk keluhan dari OPD itu sendiri mungkin keterlambatan verifikasi dari kami hal tersebut juga tidak kesalahan kami sepenuhnya karena dalam penyusunan perencanaan harus

sesuai data. Terkadang OPD juga sering memberikan data yang tidak sesuai dan kami juga mengalami keterlambatan dalam penyusunan RKPD nah jadi sama sama dirugikan, namun hal tersebut adalah hal biasa tidak sampai ada complain ataupun protes dari OPD kalau memang ada pasti akan dilakukan rapat ulang untuk membahas hal tersebut.” **Wawancara dengan Kepala BAPPEDA (11 Desember 2024).**

Daya tanggap merujuk pada kemampuan organisasi dalam merespon cepat dan sesuai dengan kebutuhan, permintaan atau perubahan yang terjadi. Pada hasil penelitian terkait keluhan-keluhan dari OPD terhadap BAPPEDA sebagian besar menanggapi bahwa tidak pernah ada keluhan yang masuk terkait kinerja BAPPEDA. Hal tersebut tersebut tidak terlalu menjadi permasalahan yang signifikan bahkan terkadang keterlambatan tersebut selalu ditanggapi dengan cepat oleh bidang terkait di BAPPEDA sesuai dengan standar pelayanan yang tercantum dalam SK Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli. Pendapat dari Kepala BAPPEDA mengenai daya tanggap terhadap sistem pelayanan di BAPPEDA bahwa setiap kinerja BAPPEDA memiliki aturan yang harus dijalankan karena Standar Operasional Prosedur (SOP) BAPPEDA tidak main-main SK tersebut adalah landasan acuan kerja untuk seluruh SDM pegawai di BAPPEDA, maka sistem kerja tidak akan terlepas dari SOP hal itu juga akan menunjukkan sejauhmana SDM memenuhi visi dan misi dari organisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait Kajian Kinerja Sumber Daya Manusia dan Penganggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Untuk Mewujudkan Bangli Era Baru. Dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori kinerja menurut Kumorotomo dalam (Erlianti & Fajrin, 2021) Terdapat empat indikator kinerja menurut Kumorotomo dalam (Erlianti & Fajrin, 2021) diantaranya efisiensi dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD mengalami adanya hambatan karena keterlambatan verifikasi data sistem SIPD dan menyebabkan waktu dalam penyusunan cukup panjang, maka dalam penyusunan dokumen oleh SDM belum dikatakan efisien. Selain itu, kekurangan anggaran dana dalam penyusunan namun dengan alokasi anggaran yang tepat digunakan sudah memenuhi kebutuhan maka dari segi penganggaran sudah dikatakan efisien. Efektivitas ini masih didapatkan bahwa ketercapaian program dan kegiatan sudah mencapai 100% ditahun 2023 maka dikatakan sudah efektif, namun dari segi kinerja SDM secara internal belum dikatakan efektif karena tidak semua SDM dapat mencapai visi dari organisasi. Dalam pemanfaatan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dengan alokasi dana yang benar maka dalam penganggaran sudah dikatakan efektif.

Keadilan dalam pemerataan tugas pokok dan fungsi sudah sesuai di semua bidang, keterlibatan SDM dan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, dan pembagian anggaran sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan. Daya tanggap respon BAPPEDA terhadap OPD sudah baik, menggunakan musyawarah sebagai media

komunikasi, dan mampu mengatasi potensi kesalahan dan keluhan dari OPD. BAPPEDA Kabupaten Bangli telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mewujudkan Bangli Era Baru, namun perlu pengembangan kapasitas SDM dan optimalisasi sistem perencanaan.

Reference

- Erlianti, D., & Fajrin, I. N. (2021). Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 1(1), 68–75.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1869>
- Husnifal, H., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Kinerja Birokrasi Dalam Pemberian Reward dan Punishment Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja Dan Pengembangan Karir Pegawai Pada Sekretariat DPRK Langsa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2546–2656. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1661>
- Indah Sri Wahyuli Lubis, & Sihombing Tunggul. (2022). Daerah (Bappeda) Kabupaten Mandailing Natal. In *Journal of Science and Social Research (Issue 3)*.
<http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Lestari, D., & Pratama, R. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah: Studi pada Bappeda Kabupaten Lombok Barat*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(3), 211–225.
- Nasution, H. F. (2019). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan kebijakan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal*. Repository Universitas Sumatera Utara.
- Rahman, A., & Nurhayati, L. (2023). *Evaluasi kinerja Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Gowa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 77–90.
- Ratnaningtyas Marendah Endah, Ramli, Syafruddin, & Edi Saputra. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Saputra Nanda, Ed.).
- Saam. (2022, May). Wujudkan Bangli Era Baru, Pembangunan Infrastruktur Digenjot. *Tribune Bali*. <https://balitribune.co.id/content/wujudkan-bangli-era-baru-pembangunan-infrastruktur-digenjot>
- Sari, N. P., & Santoso, B. (2021). *Analisis peran Bappeda dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di Kota Depok*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Simanjuntak, A. (2020). *Pengaruh peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 112–123.
- Suyata. (2023, February). Membangun Bangli, Sedana Arta Bangkitkan Rasa Jengah. *Bali Express*. <https://baliexpress.jawapos.com/bali/671179209/membangun-bangli-sedana-artabangkitkan-rasa-jengah>